

# EFEKTIVITAS BREAK TIME POLICY DALAM MEMBENTUK PERILAKU DISIPLINSISWA PADA WAKTU ISTIRAHAT DI SEKOLAH DASAR VICTORY PLUS BEKASI

*Fifi Anggraini Donohadi*  
*fifianggraini@svp.sch.id*

*Amos Neolaka*  
*amos\_neolaka@yahoo.com*

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia,  
2013 Jakarta 13630, Indonesia

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas break time policy di Sekolah Victory Plus Kota Bekasi. Waktu penelitian pada bulan April sampai Agustus 2013. Permasalahan terletak pada fokus penelitian yaitu kebijakan/policy tentang perilaku siswa SD Victory Plus Bekasi pada waktu istirahat. Kebijakan ini sudah diterapkan tetapi kurang efektif karena tempat istirahat di sekolah sangat terbatas, tidak terorganisir dengan baik, dua kali waktu istirahat yang cukup lama, sehingga siswa cenderung melakukan kegiatan yang melanggar kebijakan, misalnya: bermain bola, berlari di koridor yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Terdapat empat subfokus penelitian, yakni: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi break time policy. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara individual dan diskusi kelompok. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah SD dan wakilnya sebagai pembuat kebijakan. Diskusi kelompok pertama adalah 9 wakil guru kelas 1 sampai kelas 6, sedang diskusi kelompok kedua adalah 8 wakil siswa kelas 5 dan kelas 6 yang di antaranya pernah menjadi prefect.*

*Temuan penelitian adalah perencanaan dibuat dengan menganalisa keadaan di lapangan. Strategi pengorganisasian yang dilakukan kurang mengenai sasaran. Komitmen dan kedisiplinan guru beserta siswa sebagai pelaksana kebijakan belum 100%. Belum terjadi kesatuan pengarahan, dan pelaksana kebijakan merasa bingung karena break time policy belum pernah ditinjau ulang, dan diperbaiki sesuai dengan keadaan sekarang.*

*Kesimpulan adalah perencanaan break time policy sudah efektif, Namun, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi break time policy ini belum efektif, karena ada beberapa fungsi manajemen yang tidak efektif. Oleh karena itu secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa break time policy ini tidak efektif, perlu ditinjau ulang dan diperbaiki agar kedisiplinan siswa pada waktu istirahat dapat ditingkatkan.*

**Kata Kunci:** *Efektifivitas, break time policy, perilaku disiplin*

## A. Pendahuluan

Dalam kehidupan komunitas yang besar pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Namun, tujuan itu akan sulit tercapai jika setiap anggota komunitas mempunyai keinginan dan cara mencapai tujuan yang berbeda-beda. Seringkali upaya komunitas untuk pencapaian tujuan organisasi menimbulkan konflik antar anggota. Oleh karena itu supaya konflik dapat dihindari dan tujuan dapat dengan mudah tercapai, maka diperlukan adanya kebijakan yang mengatur setiap langkah anggota komunitas. Dengan adanya kebijakan, maka setiap anggota komunitas mempunyai kesamaan prosedur dalam melakukan sesuatu kegiatan. Selain kebijakan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah fungsi-fungsi manajemen yang membuat kebijakan berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan, dan evaluasi. Jika semua faktor berjalan dengan baik maka tujuan-tujuan dapat tercapai secara efektif. Pimpinan Sekolah Victory Plus sebagai institusi yang memiliki komunitas dengan jumlah besar (guru, karyawan, siswa), menginginkan keharmonisan dalam beraktivitas setiap anggotanya. Aktivitas para anggota komunitas khusus guru dan siswa memerlukan waktu istirahat, dan keperluan itu ditanggapi pimpinan dengan membuat kebijakan yang disebut *break time policy*, tujuannya agar anggota komunitas antara lain guru dan siswa mengetahui waktu belajar mengajar dan waktu beristirahat.

Istirahat merupakan kebutuhan dasar mutlak yang harus dipenuhi oleh semua orang. Agar tubuh berfungsi secara optimal diperlukan waktu istirahat yang cukup, dan memiliki makna yang berbeda pada setiap individu. Mubarik dan Nurul (2007:34) menyatakan bahwa istirahat berarti suatu keadaan yang tenang, relaks, tanpa tekanan emosional, dan bebas dari perasaan gelisah [1]. Beristirahat bukan berarti tidak melakukan aktivitas sama sekali. Berjalan-jalan di taman terkadang juga bisa dikatakan sebagai suatu bentuk

istirahat, duduk santai di kursi empuk atau berbaring di atas tempat tidur juga merupakan bentuk istirahat. Kegiatan sehari-hari harus diatur sedemikian rupa sehingga ada keseimbangan antara kegiatan, istirahat, dan olahraga. Istirahat tidak hanya mengurangi aktivitas otot akan tetapi dapat meringankan ketegangan pikiran dan menenteramkan rohani. Menurut Rahman (1999:51), :gunanya istirahat adalah menghilangkan zat-zat sampah yang tertimbun ditubuh selama bekerja, memperbaiki bagian-bagian tubuh yang rusak, pergantian aktivitas dari giat menjadi tidak giat, dan menurunkan/melambatkan kegiatan-kegiatan organ tubuh antara lain; jantung dan paru-paru [2]. Menurut Narrow (1645-1967) yang dikutip oleh Perry dan Potter (2005:54): terdapat enam kondisi seseorang dapat beristirahat, yaitu: merasa segala sesuatu berjalan normal, merasa diterima, merasa diri mengerti apa yang sedang berlangsung, bebas dari kekhawatiran dan ketidaknyamanan, merasa puas telah melakukan aktivitas yang berguna dan mengetahui bahwa mereka akan mendapat pertolongan bila membutuhkannya.[3]. Kebijakan waktu istirahat ini diartikan sebagai pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan. Kebijakan memang sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan institusi, tetapi supaya kebijakan dapat diterapkan dengan baik perlu adanya perencanaan, sosialisasi, kerja sama di antara pemimpin dan pegawai di institusi tersebut dan pengawasan yang baik. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia ingin diperhatikan, dihormati dan didahulukan kepentingannya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia yang lain. Berdasarkan konsep tersebut, lahirlah hubungan dan kerja sama manusia satu dengan lainnya. Manusia atau bangsa tidak dapat lepas dari hubungan kerja sama dengan manusia lain. Hal ini membuktikan bahwa proses pengorganisasian, kerjasama dan komitmen dari pelaksanaan kebijakan merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan seba-

gai makhluk sosial, sedangkan pemberian masukan juga sangat diperlukan bagi manusia sebagai makhluk individu.

## B. Temuan Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan sekolah tentang perilaku siswa SD pada waktu istirahat. Kebijakan “*break time*” ditinjau dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasiannya. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap informasi yang berkaitan dengan: perencanaan *break time policy* Sekolah Victory Plus, pengorganisasian *break time policy* Sekolah Victory Plus, pelaksanaan *break time policy* Sekolah Victory Plus, pengawasan dan evaluasi *break time policy* di Sekolah Victory Plus Bekasi

### 2. Metodologi

Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara individual dan diskusi kelompok. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah SD dan wakilnya sebagai pembuat kebijakan. Diskusi kelompok pertama adalah 9 wakil guru kelas 1 sampai kelas 6, sedang diskusi kelompok kedua adalah 8 wakil siswa kelas 5 dan kelas 6 yang di antaranya pernah menjadi *prefect*. Unsur manusia sebagai instrumen kunci, yaitu peneliti terlibat langsung dalam observasi partisipasi. Unsur informan terdiri atas kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SD, guru, dan siswa kelas 5 dan 6, karena sudah memahami arti kebijakan dan dapat mengungkapkan pendapatnya dengan jelas. Jenis data yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah bersifat skematik, narasi, penjelasan data dari informan baik lisan maupun data dokumen tertulis, perilaku subjek yang diamati di lapangan juga menjadi data dalam pengumpulan hasil penelitian ini. Berikut ini adalah teknik/alat pengumpul data berupa: rekaman audio, video, foto-foto perilaku siswa SD pada waktu istirahat.

## 3. Temuan penelitian

### a. Deskripsi Data

Setelah mengumpulkan data hasil wawancara dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SD dan hasil diskusi dari guru dan siswa kelas lima dan enam, maka diperoleh data yang merupakan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Daftar pertanyaan wawancara dan hasil jawabannya dapat dipaparkan sebagai berikut:

**Tabel 1:** Wawancara dengan kepala sekolah dan wakil

Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1. Apa yang Ibu ketahui tentang <i>break time policy</i> ?	Aturan yang mengatur mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh siswa, guru dan staf Sekolah Victory Plus selama istirahat.
2. Apakah tujuan dari <i>breaktime policy</i> ?	Memberikan pengawasan yang baik terhadap keselamatan siswa-siswi supaya tidak terjadi <i>bullying</i> dan melaku kan tindakan cepat bila terjadi insiden atau <i>accident</i> .
3. Bagaimana cara Sekolah VictoryPlus merumuskan tujuan <i>break time policy</i> ?	Menganalisa keadaan di lapangan dan kendala yang dirasakan oleh siswa atau guru lalu dirumuskan bersama dalam <i>meeting</i> apa yang perlu dilakukan dan bagaimana prosedur dari sisi siswa, guru dan atasan yang mengawasi.
4. Program apakah yang telah dilakukan Sekolah Victory Plus dalam mencapai tujuan dari <i>break time-policy</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Duty roster</i></li> <li>• <i>Prefect</i> (siswa yang bertugas mengawasi selama waktu istirahat)</li> <li>• SOP (prosedur penanganan) insiden dan accident</li> <li>• Melibatkan staf dari divisi lain</li> </ul>
5. Masalah apa saja yang ditemui sehingga <i>break-time policy</i> dibuat?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa gaduh, berlari, bermain di koridor sehingga mengganggu divisi lain</li> <li>• Kecelakaan</li> <li>• <i>Bullying</i> secara fisik, sosial ataupun verbal</li> </ul>

Pertanyaan Wawancara	Jawaban
6. Apakah <i>break time policy</i> ini dapat mengatasi masalah yang terjadi?	Ya jika dilaksanakan dengan benar dan konsisten. Setidaknya kebijakan ini dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi.
7. Sejauh ini sebelum <i>break time policy</i> dilaksanakan, bagaimana cara sekolah memecahkan masalah pada waktu istirahat?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum kebijakan dilaksanakan, aturan secara lisan sudah ada, tetapi tidak tertulis dan dibukukan</li> <li>• Duty roster</li> </ul>
8. Siapa yang terlibat dalam perencanaan <i>break time policy</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• <input type="checkbox"/> Wakil Kepala Sekolah SD (penanggung jawab kesiswaan)</li> <li>• Persetujuan Direktur Sekolah</li> </ul>
9. Apakah ada <i>break time policy</i> yang tertulis yang diketahui dan bisa diakses oleh semua pelaksana kebijakan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya, dishare melalui <i>Google Drive</i></li> </ul>
10. Apakah semua pelaksana kebijakan mengetahui tugas mereka?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seharusnya mereka tahu, karena ada peringatan jika mereka tidak melakukan duty roster.</li> </ul>
11. Bagaimana perilaku disiplin para guru dalam melaksanakan <i>break time policy</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa tahun belakangan buruk sekali, guru sering terlambat dan tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tahun ini dikedatkan dan hasilnya jauh lebih baik.</li> </ul>
12. Bagaimana perilaku disiplin para siswa dalam melaksanakan <i>break time policy</i> ?	Pengawasan lebih ketat. 90%, siswa sudah melaksanakan aturan-aturan selama istirahat
13. Bagaimana cara Sekolah Victory Plus mengorganisasi atau mengkomunikasikan <i>breaktime policy</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Google Drive</i></li> <li>• Persetujuan antara Kepala Sekolah dan guru di awal tahun ajaran sekolah</li> </ul>

Pertanyaan Wawancara	Jawaban
14. Bagaimana interaksi guru dan siswa dalam pencapaian tujuan dari <i>break time policy</i> ?	Guru tidak hanya mengawasi tapi juga berbicara dan mengajarkan moral-moral supaya siswa lebih disiplin.
15. Bagaimana menurut Ibu kerja sama dari guru dan siswa dalam melaksanakan <i>break time policy</i> ?	Siswa kita perlu ditingkatkan rasa bertanggung jawab dan menghormati. Biasanya mereka hanya menjadi pengikut dan takut pada guru yang bertugas bukan dari diri sendiri.
16. Bagaimana cara Sekolah Victory Plus menggerakkan atau mengarahkan kebijakan ini agar berjalan sesuai denganyang diharapkan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Komunikasikan harapan dari kebijakan</li> <li>• Mendapat masukan tentang hambatan dan kesulitan-kesulitan</li> <li>• <input type="checkbox"/> Diawasi, ditegaskan dan kembali ke diskusi, lalu dievaluasi dan ditinjau ulang.</li> </ul>
17. Apakah menurut Ibu konsekuensi bagi yang melanggar <i>break timepolicy</i> sudah efektif?	Lumayan, cukup efektif
18. Apakah bentuk teguran atau peringatan yang diberikan bagi siswa yang melanggar <i>break time policy</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teguran lisan</li> <li>• Bila perbuatan melanggar aturan, maka diadakan sesi dengan kepala sekolah atau konselor atau guru kelas sesuai dengan masalahnya.</li> </ul>
19. Berapa lama <i>break time policy</i> ini sudah dilakukan?	Pelaksanaan sudah dari awal sekolah
20. Kapan <i>break time policy</i> yang tertulis dibuat?	3 tahun
21. Berapa kali telah dilakukan tinjauan terhadap <i>break time policy</i> tersebut?	Belum pernah, karena permasalahannya ketidak konsistenan pelaksanaannya bukan kebijakannya.
22. Bagaimana cara Sekolah Victory Plus mengawasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan ke lapangan dari Wakil Kepala Sekolah Victory Plus</li> <li>• <input type="checkbox"/> Bila ada pelanggaran,</li> </ul>

Pertanyaan Wawancara	Jawaban
apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan rencana atau belum?	ada peringatan bagi guru atau siswa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang berhasilnya kebijakan karena disiplin dari guru</li> </ul>
23. Apakah yang dilakukan Sekolah Victory Plus dalam mengevaluasi dan meninjau ulang <i>break time policy</i> ?	Baru mengevaluasi, belum ditinjau ulang
24. Strategi apa yang Ibu bisa lakukan supaya kendala tersebut teratasi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminta bantuan divisi lain (<i>service team</i>) tetapi mereka juga mempunyai kendala yang sama.</li> <li>• <input type="checkbox"/> Yang bertuliskan <i>Supervisor</i> jadi kalau di suatu tempat tidak ada guru yang bertugas, guru yang lain bisa melaporkan hal ini ke kepala sekolah.</li> </ul>
25. Apakah menurut Ibu <i>break time policy</i> ini sudah terlaksana dengan baik?	Ya, tahun ini jauh lebih baik.
26. Kendala apa yang Ibu temui dalam melaksanakan <i>break time policy</i> ini?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekurangan personel untuk melakukan <i>duty roster</i></li> <li>• <input type="checkbox"/> Guru tidak mempunyai waktu istirahat yang cukup</li> <li>• <input type="checkbox"/> Pengawasan kurang terpantau karena atasan juga tak mempunyai waktu</li> </ul>
27. Berdasarkan evaluasi Ibu, bagaimana hasil dari strategi tersebut?	Lumayan sangat membantu
28. Apa yang dilakukan sekolah dalam rangka memperbaiki <i>break time policy</i> ini?	Tidak ada yang perlu diperbaiki dari kebijakan ini, tetapi pelaksanaannya yang perlu diperbaiki.
29. Apakah Ibu pernah memberi	Ya

Pertanyaan Wawancara	Jawaban
masukan atau pemberitahuan kepada pelaksana kebijakan?	
30. Bagaimana caranya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Soft reminder</i> melalui email</li> <li>• <input type="checkbox"/> Tahun ini dengan peringatan yang lebih tegas</li> </ul>

**Tabel 2:** Data diskusi kelompok guru, siswa kelas 5 dan 6 yang di antaranya prefect

Pertanyaan diskusi	Jawaban
1. Apakah disiplin itu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sesuai prosedur</li> <li>• Melaksanakan tata tertib yang berlaku</li> <li>• Sikap seseorang dalam mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama</li> <li>• Menurut jawaban siswa; rajin, tidak terlambat sekolah dan mengikuti aturan</li> </ul>
2. Apa yang diketahui tentang perilaku disiplin siswa pada waktu istirahat?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disiplin belum terbentuk untuk siswa kelas 1, tetapi mereka tahu lampu kelas harus dimatikan bila keluar dari kelas</li> <li>• Pada awal tahun ajaran belum disiplin, berlari, berteriak sambil tertawa</li> <li>• Semua berpakaian seragam</li> <li>• Tidak bermain game waktu istirahat</li> <li>• <i>Prefect</i> harus lebih tegas untuk ikuti aturan</li> </ul>
3. Apa yang anda ketahui tentang <i>break time policy</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipan dalam diskusi menyatakan baru pertama kali dengar, semua bingung</li> <li>• Ada yang belum tahu ada kebijakan itu</li> </ul>
4. Bagaimana cara mengkomunikasikan <i>break time policy</i> ? Apa ada yang tertulis?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada tertulis di kelas, tergantung kesepakatan guru dan siswa</li> <li>• Ada tertulis di luar kelas, berjalan, tidak</li> </ul>

Pertanyaan diskusi	Jawaban
	<p>berlari, tenang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkomunikasikan peringatan melalui e-mail</li> <li>• Beberapa anak protes, ada kelas yang diperbolehkan untuk bermain game, ada yang tidak diperbolehkan</li> <li>• Sekolah bertaraf internasional, karena itu kebijakan harus tertulis, visual, seragam</li> <li>• diberlakukan untuk SD sampai SMA bagi sekolah yang satu atap, jangan peraturan siswa tahu dari guru.</li> </ul>
5. Bagaimana usaha Sekolah Victory Plus/SVP dalam melaksanakan break time policy untuk membangun disiplin siswa pada waktu istirahat?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala sekolah mengingatkan jika ada pelanggaran aturan</li> <li>• Guru berperan mengawasi dan mengingatkan</li> <li>• Memberi tanda dikoridor “walk please” dan “use the back stairs”</li> </ul>
6. Bagaimana cara SVP memastikan <i>break time policy</i> sudah dilaksanakan dengan baik?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang mereka tahu Yayasan belum membuat kebijakan ini, tidak tahu jawaban. Siswa yang melanggar aturan dicatat sampai 3 kali dipanggil dan diperingati</li> </ul>
7. Bagaimana peran guru dalam melaksanakan <i>break time policy</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru sangat berperan, sering guru subyek menyerahkan masalah kebijakan dan disiplin ke guru kelas</li> <li>• Perlu standar pelaksanaan</li> </ul>
8. Bagaimana peran siswa dalam melaksanakan <i>break time policy</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa siswa menunjukkan <i>self-respect</i>, ada atau tidak ada guru mereka siap untuk menaati aturan</li> <li>• Beberapa siswa menaati aturan karena menginginkan <i>reward</i></li> </ul>

Pertanyaan diskusi	Jawaban
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa siswa menaati karena takut dihukum</li> </ul>
9. Bagaimana menurut anda kerjasama guru dan siswa dalam melaksanakan <i>break time policy</i> ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen sesama guru untuk kembali pada kebijakan, supaya ada kesamaan antar guru ditingkat yang berbeda</li> </ul>
10. Apakah menurut anda pelaksanaan break time policy ini sudah terlaksana dengan baik? Bagaimana anda tahu tentang konsekuensi yang diterapkan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan tidak ada, siswa tahu kebijakan ini dari guru, bukan dari sekolah</li> <li>• Konsekuensi yang pas yang dijalankan tidak ada standar</li> <li>• Mentaati peraturan jika melanggar dihukum, ikuti aturan</li> </ul>
11. Solusi terbaik apa yang dapat dilakukan untuk tingkat siswa disiplin pada waktu istirahat?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan tertulis dan visual</li> <li>• Standart agreement</li> </ul>
12. Apa ada hal lain yang anda ingin katakan tentang break time policy dan perilaku siswa pada waktu istirahat?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi antar guru harus lebih intensif supaya semua aturan jelas</li> <li>• Sekolah harus menyediakan arena bermain</li> <li>• Pernah ada kebijakan, waktu istirahat kelas dikunci, jadi guru benar-benar istirahat</li> <li>• Sebaiknya disediakan board games</li> <li>• Media Resources Central atau MRC atau perpustakaan, bisa menjadi alternatif beristirahat bagi siswa</li> <li>• Jumlah MRC perlu ditambah karena siswa juga selalu bertambah jumlahnya</li> </ul>

#### b. Pengolahan data

Berdasarkan pemaparan data maka dapat dilakukan pengolahan data (menggabungkan data kepala sekolah/wakil, guru dan siswa) seperti tertera berikut ini.

### 1) Perencanaan

- a) Tujuan dari perencanaan *break time policy* adalah memberikan pengawasan terhadap keselamatan siswa.
- b) Strategi yang telah diterapkan ada bermacam-macam seperti: *duty roster*, *prefect*, *SOP*, dan lainnya melibatkan guru, staf dan siswa.
- c) Perumusan tujuan dimaksudkan untuk menganalisa keadaan lapangan dan kendala yang dirasakan oleh siswa dan guru.
- d) Ada banyak masalah yang sering ditemui sehingga *break time policy* dibuat seperti siswa gaduh dan berlari di koridor, kecelakaan dan *bullying*.
- e) Pemecahan masalah dapat terjadi bila kebijakan ini dilaksanakan dengan benar dan konsisten akan dapat meminimalisir kecelakaan siswa yang terjadi.
- f) Keputusan tidak dapat dilaksanakan  sebelum *break time policy* yang tertulis, aturan secara lisan dan *duty roster* sudah ada.
- g) Pimpinan sekolah (kepala sekolah, wakilnya, direktur sekolah) hendaknya terlibat dalam pembuatan *break time policy*.

### 2) Pengorganisasian

- a) Menurut kepala sekolah/wakilnya ketertiban tahun ini guru melaksanakan *break time policy* dengan lebih baik, sedangkan sebagian besar siswa telah melaksanakan *break time policy* tersebut.
- b) Kesatuan pengarahan, kepala sekolah SD mengatakan bahwa seharusnya guru tahu karena ada peringatan jika mereka tidak melakukan *duty roster*. Terjadi kesatuan pengarahan karena *break time policy* disebarkan melalui berbagai macam cara yaitu; *Google Drive* yang merupakan suatu alat penyebaran informasi secara elektronik semacam email dan juga

persetujuan antara kepala sekolah dengan guru diawal tahun ajaran.

- c) Untuk komitmen dan interaksi, dikatakan bahwa interaksi guru dan siswa terjalin dengan baik sehingga diharapkan *break time policy* terlaksana dengan baik, tetapi siswa harus lebih diajarkan rasa tanggung jawab dan hormat.

### 3) Pelaksanaan

- a) Kesatuan pengarahan menurut kepala sekolah SD adalah pelaksanaan *break time policy* dapat berjalan dengan baik jika ada kesatuan pengarahan dari pemimpin dan semua pelaksana tahu akan tugasnya.
- b) Menurut pimpinan sekolah berbagai strategi telah dilakukan sekolah untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan *break time policy* seperti sosialisasi, masukan tentang hambatan dan kesulitan, pengawasan dan pengevaluasian.
- c) Disiplin dan ketertiban, menurut kepala sekolah SD tahun ini lebih baik, karena 90% siswa sudah disiplin dan tertib dalam melaksanakan *break time policy*.
- d) Interaksi dan kerjasama guru dan siswa memiliki peran sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan *break time policy*.
- e) Kepala Sekolah SD berpendapat bahwa konsekuensi yang diterapkan cukup efektif.

### 4) Pengawasan dan Evaluasi

- a) Waktu: pelaksanaan *break time policy* ini sudah ada sejak awal sekolah, tetapi secara tertulis *break time policy* baru dibuat 3 tahun lalu.
- b) Frekuensi *break time policy* belum pernah ditinjau ulang.
- c) Dalam evaluasi dan koreksi, menurut Kepala Sekolah SD, *break time policy* ini sudah terlaksana dengan baik sehingga tidak perlu diperbaiki.

- d) Dalam pelaksanaannya banyak strategi yang telah dilaksanakan dalam mengawasi *break time policy* ini seperti pengawasan ke lapangan, peringatan bagi yang melanggar. Dikatakan bahwa pelaksanaan *break time policy* ini sudah berjalan dengan baik dan semua pihak tahu akan tugasnya.
- e) Di samping keberhasilan pelaksanaan *break time policy*, juga ditemui banyak kendala seperti kekurangan personel, guru tidak mempunyai waktu istirahat yang cukup dan pengawasan kurang terpantau karena atasan tidak mempunyai waktu.
- f) Terdapat banyak strategi yang telah diterapkan dan berhasil untuk mengatasi kendala tersebut seperti meminta bantuan divisi lain dan memakai sling yang bertuliskan *supervisor*.
- g) Kepala Sekolah selalu memberikan masukan atau pemberitahuan kepada pelaksana *break time policy*.

### c. Temuan penelitian

Berdasarkan deskripsi data dan hasil pengolahan yang telah dilakukan maka terdapat temuan penelitian, yang tertera pada kotak satu berikut :

#### Kotak 1 : Temuan penelitian

- Perencanaan kebijakan *break time policy* dibuat dengan menganalisis keadaan lapangan.
- Strategi pengorganisasian yang dilakukan kurang mengenai sasaran
- Komitmen dan kedisiplinan guru dan siswa sebagai pelaksana kebijakan kurang atau belum 100%.
- Belum terjadi kesatuan pengarahan
- Pelaksana kebijakan merasa bingung karena *break time policy* belum pernah ditinjau ulang dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan keadaan sekarang

### d. Pembahasan temuan penelitian

#### 1) Perencanaan kebijakan *break time policy* dibuat dengan menganalisis keadaan lapangan

*Break time policy* adalah aturan yang mengatur mengenai apa yang harus dilakukan oleh siswa, guru dan staf Sekolah Victory Plus selama istirahat. Hal ini didukung oleh Hadyaningrat (1995:12) yang menyatakan bahwa kebijakan sebagai prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, dan kebijakan itu senantiasa berorientasi kepada masalah/*problem-oriented* dan tindakan/*action-oriented*[4]. Tujuan *break time policy* ini adalah memberikan pengawasan yang baik terhadap keselamatan siswa-siswi supaya tidak terjadi *bullying* dan melakukan tindakan cepat bila terjadi kecelakaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa *break time policy* dibuat dengan menganalisa keadaan di lapangan, keadaan di sekolah dan kendala yang dirasakan siswa atau guru. Setelah menganalisa keadaan lapangan, maka kebijakan dirumuskan bersama dalam pertemuan tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana prosedur dari sisi siswa, guru dan atasan yang mengawasi. *Break time policy* ini dibuat oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan disetujui oleh Direktur Sekolah. Berbagai macam strategi telah diterapkan seperti *duty roster*, *prefect* dan adanya SOP (Standard Operation Procedure). Selain itu strategi lain yang digunakan adalah *prefect* atau siswa yang dipilih untuk membantu mengawasi selama waktu istirahat. Diharapkan strategi ini dapat membantu mengatasi masalah yang sering terjadi, di antaranya kecelakaan dan *bullying*.

#### 2) Strategi pengorganisasian yang dilakukan kurang mengenai sasaran

Untuk mencapai tujuan *break time policy*, sekolah telah melakukan berbagai macam program atau tindakan agar komunitas sekolah memiliki kelakuan kerja sama yang efektif. Pernyataan ini didukung oleh Terry (2006:17) yang menyatakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan

hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara komunitas, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan tertentu pula [5]. Pada Sekolah Victory Plus melakukan program tersebut seperti melaksanakan *duty roster*, memilih *prefect* (siswa yang bertugas mengawasi selama waktu istirahat) dan mempunyai SOP (Standard Operation Procedure) insiden dan kecelakaan serta melibatkan staf dari divisi lain untuk mengawasi istirahat. Sebelum kebijakan dilaksanakan, aturan secara lisan sudah ada, tetapi tidak tertulis dan dibukukan. *Break time policy* yang tertulis sudah dikomunikasikan oleh kepala sekolah melalui *Google Drive* dan persetujuan antara kepala sekolah dan para guru di awal tahun. Kepala sekolah mengatakan seharusnya semua guru tahu karena selalu ada peringatan jika guru tidak melakukan *duty roster*. Menurut guru dan siswa, mereka sama sekali tidak tahu adanya *break time policy* tertulis. Guru mengatakan bahwa mereka memang sering mendapat email dari kepala sekolah tentang permasalahan yang terjadi pada waktu istirahat atau peringatan untuk melaksanakan *break time policy* dengan lebih baik, tetapi bukan tentang *break time policy* yang tertulis. Mereka mengatakan apa yang mereka lakukan berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa sehingga tidak adanya kesamaan akan apa yang seharusnya dan yang tidak seharusnya dilakukan pada waktu istirahat. Pihak siswa mengatakan bahwa mereka tahu tentang *break time policy* tersebut dari guru. Jadi dari hasil diskusi dengan guru dan siswa, solusi terbaik adalah menambah strategi pengorganisasian tidak hanya melalui *Google Drive* saja, tetapi membuat *break time policy* secara visual sehingga semua pelaksana kebijakan dapat mengakses dan mengetahui tentang *break time policy* dengan baik.

### 3) Komitmen dan kedisiplinan guru serta siswa sebagai pelaksana kebijakan belum 100 %

Kepala Sekolah SD berpendapat bahwa beberapa tahun belakangan pelaksanaan *break time policy* buruk sekali, guru sering terlambat dan tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tahun ini dketatkan dan hasilnya jauh lebih baik. Tahun ini hampir semua guru dan sebagian besar siswa melaksanakan *break time policy* ini dengan baik. Menurut beliau, kesatuan pengarahannya terjadi dengan baik karena *break time policy* ini disebarkan melalui *Google Drive* dan pertemuan guru di awal tahun ajaran sehingga semua guru seharusnya tahu adanya *break time policy* tertulis yang ada di Sekolah Victory Plus. Interaksi dan ketertiban guru dan siswa dalam menjalankan *break time policy* ini juga berjalan dengan baik. Pada waktu istirahat, guru tidak hanya mengawasi tetapi juga mengajak berbicara dan mengajarkan moral-moral supaya siswa lebih disiplin. Siswa perlu ditingkatkan rasa bertanggung jawab dan menghormati. Menurut Prijodarminto pelaksanaan kebijakan memerlukan partisipasi dan disiplin. Dalam melakukan partisipasi, diperlukan komunikasi yang efektif dan komitmen dari para pelaksana kebijakan. Sedangkan supaya sikap disiplin terbentuk, diperlukan ketertiban dan konsekuensi [6]. Biasanya mereka hanya menjadi pengikut dan takut pada guru yang bertugas bukan dari diri sendiri. Wakil kepala sekolah berpendapat bahwa hanya sekitar 70% guru dan 65% siswa yang melaksanakan *break time policy* dengan baik. Sedangkan guru-guru tidak yakin bahwa *break time policy* ini dapat terlaksana dengan baik karena tidak adanya kebijakan yang sama dan tertulis. Mereka mengatakan apa yang mereka lakukan berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa sehingga tidak adanya kesamaan akan apa yang seharusnya dan yang tidak seharusnya dilakukan pada waktu istirahat. Pihak siswa mengatakan bahwa mereka tahu tentang *break time policy* tersebut dari guru. Menurut mereka sebagian besar

guru sudah melaksanakan *break time policy* dengan baik sementara siswa belum melaksanakan dengan baik.

#### 4) Belum terjadi kesatuan pengarahan

Kepala Sekolah dan wakil kepala sekolah SD juga mengatakan bahwa kesatuan pengarahan akan terjadi dengan baik jika adanya persetujuan antara Kepala Sekolah dan guru di awal tahun ajaran untuk selalu mengingatkan kembali tentang pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu juga adanya pengawasan dari Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, sehingga guru dan siswa tertib bekerja sama dalam melaksanakan *break time policy* tersebut. Wahab (1997:59) menjelaskan bahwa suatu kebijakan gagal diimplementasikan disebabkan beberapa faktor antara lain; pihak-pihak yang terlibat tidak mau bekerja sama dalam pelaksanaan kebijakan dan bekerja tidak efisien [7]. Konsekuensi yang telah diterapkan sekolah juga cukup efektif untuk membantu pelaksanaan kebijakan tersebut. Guru-guru menjawab bahwa mereka tidak pernah tahu adanya *break time policy* tertulis, sehingga tidak ada standard. Hal ini bertentangan dengan pendapat Kepala Sekolah yang mengatakan bahwa semua guru seharusnya tahu karena *break time policy* ini sudah dikomunikasikan. Mereka tidak yakin bahwa *break time policy* ini terlaksana dengan baik karena tidak adanya kebijakan yang sama dan tertulis. Banyak strategi yang telah dilakukan sekolah tetapi semuanya kembali ke peran guru yang sangat penting dalam terlaksananya *break time policy* ini. Konsekuensi yang diberikan oleh para gurupun tidak sama, semua tergantung masing-masing guru. Siswa mengetahui *break time policy* ini dari guru-guru mereka. Mereka juga tidak pernah melihat adanya *break time policy* tertulis. Mereka berpendapat konsekuensi yang telah diterapkan tidak efektif. Dalam pelaksanaan *break time policy* ini, peran guru dan siswa (*prefect*) sangatlah penting karena mereka yang mengawasi jalannya kebijakan ini. Tugas *prefect* menurut mereka juga tidak efektif,

karena siswa dari kelas yang lebih tinggi biasanya tidak mau mendengarkan teguran mereka. Selain itu mereka menemukan adanya ketidakjelasan kebijakan tentang penggunaan tangga belakang. Ada yang berpendapat boleh lewat tangga belakang, ada yang berpendapat tidak boleh. Menurut mereka, mempertegas hukuman dan membuat kebijakan yang jelas akan meningkatkan kedisiplinan siswa dalam melaksanakan *break time policy* ini.

#### 5) Pelaksana kebijakan merasa bingung karena *break time policy* belum pernah ditinjau ulang dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan keadaan sekarang

Menurut Kepala Sekolah dan wakilnya, *break time policy* ini sudah ada sejak awal sekolah, tetapi yang tertulis baru dibuat 3 tahun lalu. *Break time policy* ini belum pernah ditinjau ulang, karena menurut beliau *break time policy* ini sudah baik yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaannya. Untuk mengawasi jalannya *break time policy* ini, Wakil Kepala Sekolah langsung melakukan pengawasan ke lapangan untuk memastikan guru, staf dan siswa melakukan tugasnya untuk memastikan siswa dalam keadaan aman. Jika ada guru dan staf yang tidak melakukan tugasnya, Kepala Sekolah dan wakilnya memberikan peringatan dan memberikan masukan atau pemberitahuan kepada pelaksana *break time policy* tentang tugas mereka. Menurut guru, harus ada kebijakan yang jelas sehingga ada kesamaan antar semua guru. Pelaksana *break time policy* bingung karena kebijakan dari sekolah tidak jelas sehingga konsekuensi juga tidak jelas. Perbaikan yang perlu dilakukan adalah adanya kebijakan tertulis dan visual sehingga ada *standard agreement* dan penambahan fasilitas seperti fasilitas bermain, membuat jadwal pemakaian fasilitas dan konsekuensi yang jelas.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian disimpulkan bahwa (1) para pemimpin di Sekolah Victory Plus/SVP sudah melakukan perencanaan *breaktime policy* dengan baik dan efektif. (2) pelaksanaan kebijakan *break time policy* dikatakan cukup baik dalam pengorganisasian karena ada pembagian tugas yang jelas, kebijakan dikomunikasikan lewat Google drive. Para guru dan siswa berpendapat lain karena mereka belum tahu, disiplin yang ada akibat kesepakatan guru dan siswa, jadi *break time policy* belum efektif. (3) Pelaksanaan *break time policy* telah diterapkan dalam bentuk *duty roster*, *prefect* dan SOP (Standard Operational Procedure). (4) Pengawasan dan evaluasi *break time policy* belum efektif, karena masukan dan saran perbaikan dari tim pengawasan dan evaluasi setelah 3 tahun berjalan kebijakan ini tidak dilaksanakan. (5) Pelaksanaan *break time policy* belum efektif karena fungsi-fungsi manajemen kurang efektif, terlihat dari interaksi dan keterkaitan setiap fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, masing-masing berjalan sendiri.

Negara. Jakarta: Bumi Aksara, p.59, 1997.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Mubarik, Wahit & Nurul, Chayatin. *Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia dan Aplikasi dalam Praktik*. Jakarta: EGC, p.34, 2007.
- [2] Rahman, Maman. *Disiplin Siswa di Sekolah*. Jakarta: Grafindo, p. 51, 1999.
- [3] Potter & Perry. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan, Konsep, Proses, dan Praktik*. Jakarta: EGC, p.54, 2005
- [4] Hadayaningrat, Soewarno. *Azas-azas Organisasi Manajemen*. Jakarta CV. Mas Agung, p.12, 1995.
- [5] Terry, Robert G. *Principles of Management*. Illionis: HomeWood, p.17, 2006.
- [6] Priyodarminto, Soegeng. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, p. 36, 1992.
- [7] Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan*